

# **Malaikat Kematian atau Ratu Perdamaian?**

**Agama di dalam Politik Global Abad 21**

**Oleh Dr. der Phil. Reza A.A Wattimena**

## ***Abstrak***

*Tulisan ini hendak melihat perkembangan kajian ilmiah atas peran agama di dalam politik global. Agama tidak lagi dilihat sebagai semata urusan pribadi, melainkan terkait dengan kehidupan bersama. Perannya pun tidak bisa lagi diabaikan di dalam politik global abad 21. Kajian ilmiah atas agama juga telah melintasi berbagai cabang keilmuan, mulai dari filsafat, ilmu politik sampai dengan hubungan internasional. Tulisan ini juga menukik masuk ke dalam pertanyaan mendasar, apakah agama pencipta konflik, atau pendukung perdamaian? Beberapa pertimbangan kritis akan diberikan untuk menjawab pertanyaan tersebut.*

**Kata Kunci: Agama, Sekularisme, Politik Global, Perang, Perdamaian.**

Malaikat kematian atau ratu perdamaian? Dua kata ini memang terhubung dengan agama di abad 21 ini. Di satu sisi, ajaran agama dianggap sebagai sumber diskriminasi dan kekerasan. Begitu banyak terorisme dan kekerasan yang berpijak pada ajaran agama terjadi dewasa ini. Indonesia pun sudah kenyang dengan pengalaman semacam ini.

Di sisi lain, begitu banyak karya kebaikan yang diluncurkan atas nama agama. Gerakan-gerakan kemanusiaan dilakukan oleh organisasi yang berpijak pada agama. Gerakan perdamaian di daerah konflik juga dilakukan dengan menggunakan ajaran agama. Agama pun memberikan arah dan makna bagi hidup banyak orang.

Satu hal yang tak bisa disangkal, agama kini berperan besar di dalam politik global. Berbagai kajian ilmu, mulai dari filsafat, teologi sampai dengan ilmu politik, melihat agama sebagai bahan kajian yang penting. Tulisan ini hendak menjelaskan perkembangan ini, sekaligus melihat peran agama secara nyata di dalam politik global. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian.

Awalnya, tulisan ini akan menjabarkan berbagai bentuk kajian ilmiah tentang peran agama di dalam politik global. Bagian kedua akan melihat hubungan agama dengan kekerasan, sekaligus dengan perdamaian. Bagian ketiga adalah kesimpulan dari keseluruhan tulisan. Sumber utama tulisan mengacu pada karya Baumgart-Ochse, sekaligus penelitian-penelitian sebelumnya oleh penulis.

### **1. Agama di dalam Kajian Ilmu Hubungan Internasional**

Agama kini tidak hanya menjadi kajian dari ilmu filsafat dan ilmu agama itu sendiri, tetapi juga menjadi kajian di dalam ilmu politik. Dan karena pengaruhnya yang bersifat internasional, ilmu hubungan internasional pun mulai melihat agama sebagai unsur penting di dalam politik global.<sup>1</sup> Di Eropa misalnya, sejak 2006 didirikan *Standing Group on Religion and Politics* di tingkat Uni Eropa. Pada 2013, *International Studies Association* (ISA) juga mendirikan pusat penelitian terkait dengan pengaruh agama di dalam politik internasional.

Beberapa universitas besar pun memutuskan untuk mendirikan pusat penelitian tentang agama. Universitas Georgetown di Washington, Amerika Serikat mendirikan *Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs*. Universitas Berkeley di California AS mendirikan *Globalization Program. Center for the Study of Religion, Conflict, and*

---

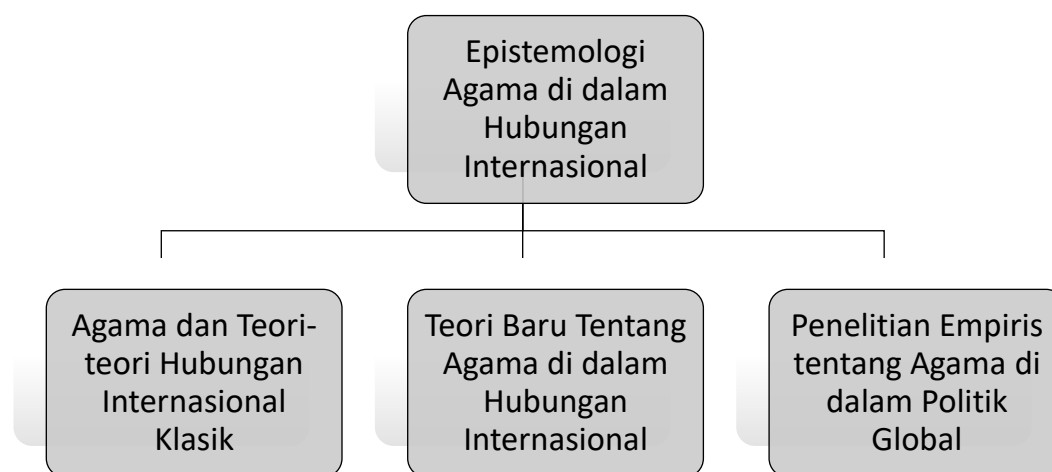
<sup>1</sup> Kerangka mengacu pada (Baumgart-Ochse 2017)

*Cooperation* didirikan di *Metropolitan University* di London. Universitas Gronigen di Belanda pun mendirikan *Center for Religion, Conflict, and the Public Domain*.

Di masa lalu, agama dianggap berperan kecil di dalam politik internasional. Ini terjadi, karena proses sekularisasi di Eropa telah menyingkirkan agama dari ruang publik. Agama pun menjadi urusan pribadi setiap orang semata. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan, bahwa pandangan itu sudah berubah. Di banyak tempat, agama masih menjadi kekuatan sosial politik yang amat berpengaruh. Akibatnya, agama pun harus diberikan tempat di dalam kajian politik internasional. Ilmu politik dan ilmu hubungan internasional pun mulai memberi ruang cukup besar untuk kajian tentang pengaruh agama terhadap politik global.

### Bagan 1

#### Epistemologi Agama di dalam Hubungan Internasional<sup>2</sup>



Ada tiga cara untuk memahami kaitan antara agama dan politik global. *Yang pertama* adalah mengaitkan langsung agama ke dalam berbagai teori hubungan internasional yang telah ada, misalnya realisme, neoliberalisme dan kosmopolitanisme. *Yang kedua* adalah merumuskan sebuah teori baru tentang agama di dalam politik internasional. *Yang ketiga* adalah upaya untuk menjawab pertanyaan tertentu terkait

---

<sup>2</sup> Hasil Rumusan Penulis

dengan pengaruh agama di politik global. Misalnya, bagaimana menciptakan tata agama yang mendukung terjadinya perdamaian di satu daerah tertentu.<sup>3</sup>

Di dalam ilmu hubungan internasional, ada tiga teori besar, yakni neorealisme, konstruktivisme dan liberalisme. Dari satu sudut pandang tertentu, pengaruh agama di dalam politik global dapat dipahami dalam tiga terang teori tersebut. Dari sudut pandang teori neorealisme, agama dapat dilihat sebagai unsur kekuasaan (*power*) yang turut menghadirkan adanya tatanan (*order*), seperti negara dan sistem-sistem yang menopangnya. Di dalam konstruktivisme, agama dilihat sebagai pembentuk budaya, sekaligus sumber dari pembentukan identitas dan nilai-nilai kehidupan.

Di dalam sejarahnya, liberalisme berpijak pada nilai-nilai Kristiani sekaligus agama Yahudi. Konsep kesetaraan di dalam Tuhan lalu diterjemahkan ke dalam konsep kesetaraan di hadapan hukum.<sup>4</sup> Pemahaman tentang kesetaraan inilah yang menjadi dasar kokoh bagi ide demokrasi sekaligus hak-hak asasi manusia.<sup>5</sup> Di dalam teori hubungan internasional, terutama terkait dengan agama, demokrasi dan hak-hak asasi manusia tetap menjadi pijakan kebijakan di dalam politik global. Agama tidak dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tradisi liberal, melainkan justru sebagai penyokong utamanya.

Pada dasarnya, neorealisme, konstruktivisme dan liberalisme bukanlah sebuah teori mandiri. Ketiganya adalah perangkat metodologis untuk memahami berbagai pola di dalam hubungan internasional. Dalam arti ini, agama dilihat sebagai sebetuk identitas di dalam masyarakat global. Ia bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai hal lainnya di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penting kiranya memahami akar dari neorealisme, konstruktivisme dan liberalisme ini.

Di dalam realisme klasik, kekuasaan adalah unsur penentu politik global. Agama pun dilihat dalam terang pemahaman ini, yakni sebagai pengumpul dan pelestari kekuasaan yang mempengaruhi politik global. Agama tidak hanya dilihat sebagai urusan pribadi, seperti dalam pandangan sekularisme dan liberalisme. Agama dilihat sebagai alat pengumpul dukungan politik, sekaligus dukungan massa, untuk mempengaruhi tidak

---

<sup>3</sup> Lihat (Wattimena, Kompleksitas Agama di Abad 21: Pemahaman Transdisipliner dan Relevansinya untuk Indonesia 2019)

<sup>4</sup> Lihat (Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik 2007)

<sup>5</sup> Lihat (Hardiman 2016)

<sup>6</sup> (Wattimena, Kompleksitas Agama di Abad 21: Pemahaman Transdisipliner dan Relevansinya untuk Indonesia 2019)

hanya politik lokal, tetapi juga politik global. Ini tentu mengabaikan fakta, bahwa ketika agama dijadikan kendaraan berpolitik kekuasaan, maka politik, sekaligus agama itu sendiri, akan hancur.

Di dalam kaca mata teori neorealisme, agama dilihat sebagai unsur pembentuk kekuasaan, sekaligus unsur penentu faktor keamanan masyarakat. Agama memberikan struktur tertentu pada masyarakat. Nilai-nilai agama memastikan hidup bersama menjadi teratur. Ini adalah se bentuk kekuasaan. Kemampuan agama untuk mencipta dan melestarikan tatanan adalah unsur penting di dalam keamanan, sekaligus merupakan bagian penting kekuasaan politik itu sendiri.

Liberalisme klasik melihat kebebasan sebagai ciri utama politik, baik politik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>7</sup> Kebebasan tersebut terwujud dalam hak-hak asasi manusia yang berlaku untuk semua manusia, tanpa kecuali. Namun, dengan berkembangnya kompleksitas hidup, baik di tingkat nasional maupun global, liberalisme sebagai kerangka berpikir pun mulai berkembang menjadi neo-liberalisme. Kata ini memang memiliki banyak arti.

Di dalam ilmu hubungan internasional, neoliberalisme mengacu pada fakta dasar, bahwa seluruh dunia kini saling terkait satu sama lain. Inilah yang disebut sebagai interdependensi.<sup>8</sup> Berbagai negara, organisasi internasional, hukum internasional dan berbagai kelompok yang melintasi batas-batas bangsa kini menciptakan tata global yang begitu luas dan kompleks. Dengan pola semacam ini, agama jelas memainkan peranan penting dalam politik global.

Agama juga dapat dilihat sebagai unsur penting bagi kerja sama global. Bangsa-bangsa, maupun organisasi internasional lainnya, yang memiliki nilai-nilai serupa dengan berpijak pada agama yang ada, bisa menjalankan kerja sama dengan lebih efektif dan efisien. Agama juga dapat dipahami sebagai se bentuk kekuatan lunak (*soft power*). Ia bukan merupakan senjata tempur untuk menekan secara politik, melainkan penggalang solidaritas untuk melawan ketidakadilan. Hal ini kiranya sejalan dengan pandangan English School dan konstruktivisme di dalam hubungan internasional.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> (Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik 2007) dan (Habermas 1989)

<sup>8</sup> (Wattimena, What are the Fundamental Pillars of Contemporary Globalization? July 2018 Volume 42)

<sup>9</sup> Lihat (Baumgart-Ochse 2017) dan (Reza A.A Wattimena 2018)

Pandangan ini kiranya perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Sebagai rumah dari berbagai teori di dalam ilmu hubungan internasional, Eropa mengalami proses sekularisme yang mendalam. Agama dan negara dipisahkan begitu jelas. Negara dijalankan dengan prinsip-prinsip yang bersifat rasional. Sementara, agama menjadi urusan pribadi masing-masing orang. Dalam konteks ini, agama pun disingkirkan dari berbagai teori hubungan internasional yang ada.

Pandangan ini tentu tidak tepat. Jauh sebelum berbagai teori tentang tata kelola negara maupun hubungan internasional ada, agama sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropa secara mendalam. Maka, peran agama pun tidak dapat diabaikan begitu saja, walaupun sekularisme sudah terjadi. Tidak hanya itu, beberapa konsep teori politik modern, seperti komunitas dan kesetaraan antar manusia, justru berakar pada agama. Maka, seperti dinyatakan oleh Michael Reder, agama tetap memainkan peranan penting di era sekularisme, terutama dalam pembentukan maupun pelestarian tata politik yang ada.<sup>10</sup>

Pendekatan pertama, seperti dijelaskan sebelumnya, hendak menggabungkan berbagai teori hubungan internasional tradisional dengan agama. Pendekatan kedua hendak merumuskan sebuah teori baru tentang pengaruh agama di dalam hubungan internasional. Salah satu yang cukup menonjol adalah analisis yang dibuat oleh Huntington. Baginya, sejarah peradaban manusia adalah sejarah benturan antara peradaban, yakni antara Barat dan Timur. Barat dengan tradisi Yahudi-Kristianinya. Sementara, Timur dengan tradisi Islam di Timur Tengah, dan tradisi Konfusianisme-Taois di Asia Timur. Huntington juga menjabarkan beberapa peradaban besar lainnya di dunia.

Pendekatan semacam itu juga dianggap gagal memahami inti dari agama. Agama lalu dilihat dalam kaca mata positivisme ilmiah. Pendekatan ini mengabaikan kompleksitas agama itu sendiri, termasuk unsur mistik yang menjadi inti dari semua agama. Agama pun dilihat melulu sebagai dengan kaca mata ilmiah yang seratus persen terukur dan rasional. Ini tentunya tak lepas dari suasana sekularisme yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Sekularisme ini juga amat kuat mempengaruhi dunia penelitian ilmiah disana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat (Reder 2014)

<sup>11</sup> Lihat sejarah perkembangan sains (Wattimena, Filsafat dan Sains 2008)

Pendekatan lain berusaha melihat agama sebagai sesuatu yang kompleks. Ia melihat agama dari sudut pandang sebagaimana agama dihidupi oleh banyak orang. Ia terwujud tidak hanya dalam pengakuan iman, tetapi juga di dalam hidup sehari-hari. Agama pun menawarkan makna sekaligus arah bagi hidup manusia, termasuk dalam konteks politik global. Pendekatan ini menolak melihat agama secara positivistik, yakni sebagai sesuatu yang melulu terukur dan ilmiah.

Jadi, tentang agama, ilmu hubungan internasional setidaknya melihat tiga metode. Yang pertama adalah menghubungkan agama dengan teori-teori tradisional yang sudah ada di dalam kajian ilmu hubungan internasional. Yang kedua adalah membangun sebuah teori baru tentang peran agama di dalam politik global. Yang ketiga, yang masih perlu penjelasan, adalah dengan melakukan kajian-kajian khusus terhadap peran agama di dalam hubungan internasional. Yang kiranya amat penting sekarang ini adalah melihat hubungan antara agama dan kekerasan di dalam politik internasional.<sup>12</sup>

Beberapa kajian sudah menunjukkan, bahwa agama bisa mendorong terjadinya konflik dan kekerasan di politik global. Tindakan terorisme berpijak pada agama yang terjadi di berbagai belahan dunia adalah bukti nyata atas hal ini.<sup>13</sup> Di sisi lain, banyak pula penelitian yang menunjukkan, bahwa agama bisa menjadi jembatan perdamaian antar bangsa. Dua hal amat penting di titik ini. Pertama, pemahaman tentang hubungan antara agama dan politik amat mempengaruhi peran agama di dalam politik global. Kedua, kekuatan institusi pemerintahan terhadap pengaruh agama juga amat penting di dalam menentukan hal ini. Jika irisannya terlalu besar, maka hubungan merusak antara politik kekuasaan dan agama akan dengan mudah tercipta.

Setiap negara memiliki konteksnya yang unik terkait dengan hubungan antara politik dan agama. Indonesia, misalnya, menciptakan tata politik yang berpijak pada nilai-nilai universal yang ada di dalam agama. Walaupun begitu, politik dibangun atas dasar nilai-nilai nasionalisme yang melintasi berbagai perbedaan agama. Namun, pada penerapannya, politik kekuasaan banyak bekerja sama dengan tafsiran agama sempit yang intoleran. Ini tentunya menciptakan banyak kekacauan dan diskriminasi terhadap minoritas di dalam politik Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat (Wattimena, Agama dan Kekuasaan: Tinjauan Transkeilmuan dan Kritik Ideologi July 2019)

<sup>13</sup> Lihat (B. A. Reza A.A Wattimena 2018)

<sup>14</sup> Problematik toleransi lihat (A. A. Reza A.A Wattimena 2018) dan (Rheinhold Weber et.al 2016)

Di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang sudah mapan, agama dibatasi perannya di dalam politik. Agama menjadi urusan pribadi yang tidak bisa dipaksakan ke masyarakat luas. Ini bukan berarti, bahwa agama kehilangan arti pentingnya. Agama bisa menawarkan cara berpikir tertentu di dalam menanggapi tantangan-tantangan politik. Namun, keputusan tertinggi politik berpijak pada konstitusi dan diskusi di masyarakat luas, bukan atas ajaran agama tertentu. Inilah yang dimaksud dengan masyarakat pasca-sekular, dimana agama memainkan peranan penting sebagai pijakan nilai di dalam masyarakat demokratis dan terglobalisasi.<sup>15</sup>

Pola hubungan antara agama dan politik di sebuah negara tentu mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. Negara dengan budaya politik yang mandiri dari agama cenderung mencari jalan tengah untuk memecahkan masalah-masalah global. Mereka tidak didorong oleh ajaran tertentu yang bersifat mutlak, melainkan oleh akal sehat dan data. Sebaliknya, negara dengan pengaruh agama yang kuat cenderung tak efektif dan efisien di dalam memecahkan masalah. Akal sehat dan data diabaikan demi kepatuhan buta pada seperangkat ajaran moral yang tak lagi cocok dengan perubahan jaman. Disini penting untuk memahami hubungan antara agama dan kekuasaan.<sup>16</sup>

Sekularisme, yakni pemisahan tegas antara agama dan negara, memang masih menjadi paham penting. Namun, batasannya kini menjadi semakin tipis. Sekularisme sendiri telah banyak mendapat kritik. Walaupun ia bagus untuk mengelola masyarakat yang majemuk dalam soal agama, namun sekularisme tidak mampu memberikan pendasaran nilai yang kokoh untuk mengelola politik dan ekonomi. Beberapa pemikir pun mulai mempertanyakan keabsahan sekularisme.

Disini, pemikiran Jürgen Habermas tentang pemikiran pasca-metafisik dan masyarakat pasca-sekular menjadi penting. Ia berpendapat, bahwa sekularisme tidak mampu mengatasi krisis yang muncul di masyarakat majemuk terglobalisasi saat ini. Maka dari itu, sekularisme harus menimba nilai dan kekuatan komunitas dari agama-agama yang ada. Namun, agama-agama tersebut harus mampu menyampaikan ide-idenya dengan bahasa sekular yang mampu dipahami semua orang. Dengan pola ini, Habermas lalu merumuskan konsep masyarakat pasca-sekular, yakni masyarakat

---

<sup>15</sup> Bdk (Reder 2014) dan (Wattimena, Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya 2016)

<sup>16</sup> Lihat (Wattimena, Agama dan Kekuasaan: Tinjauan Transkeilmuan dan Kritik Ideologi July 2019) dan (Nye 2008)



sekular yang menggunakan agama untuk memperkuat dasar nilai maupun komunitas mereka.<sup>17</sup>

Krisis sekularisme sendiri sebenarnya berjalan searah dengan krisis modernitas. Sebagai sebuah era, modernitas ditandai dengan penggunaan akal budi untuk tata kelola hidup bersama. Salah satu dampaknya adalah lahirnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat. Namun, modernitas menciptakan krisis makna dan bahkan dua perang dunia yang hampir menghancurkan peradaban manusia.<sup>18</sup> Dengan pertimbangan inilah sekularisme perlu untuk menoleh kembali ke agama, guna mencari sumber nilai dan kekuatan komunitas yang ditawarkannya.

Namun, memang agama tidak boleh dipandang secara naif. Agama tidak hanya mengandung nilai dan kekuatan komunitas, tetapi juga politik yang menciptakan perang serta diskriminasi. Sejarah banyak membuktikan hal ini. Sebagai paham politik, sekularisme tepat ingin menanggapi kecenderungan ini. Kajian terhadap sekularisme dan agama menjadi amat penting, terutama sejak serangan terhadap menara kembar di New York pada 2001 lalu.

Para pemikir sekular memang menegaskan, bahwa sekularisme adalah jalan untuk menciptakan tata negara yang bersif, profesional dan terbuka. Mereka berpijak pada pengandaian dasar, bahwa agama adalah sumber dari kebodohan dan keterbelakangan manusia.<sup>19</sup> Dengan perkembangan modernitas, ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah seharusnya agama hilang dari peradaban manusia. Memang, sasaran kritik mereka adalah Agama Kristen yang berpengaruh amat besar di Eropa dan Amerika. Di abad 21, sasaran kritik mereka pun berkembang ke agama Islam yang dianggap terbelakang, dan tak cocok dengan perkembangan jaman.

Pandangan sekularisme ekstrem semacam ini tentu bermasalah. Beberapa pemikir pun mulai melihat kemungkinan lain, yakni dengan mengembangkan ide tentang pemikiran pasca-sekularisme. Inti dari pemikiran pasca-sekular adalah melampaui perbedaan tajam antara iman dan akal budi, ataupun agama dan politik. Ide-ide politik modern, seperti demokrasi, keadilan, keterbukaan, kebebasan dan kesetaraan tidak

---

<sup>17</sup> Lihat (Reder 2014) dan (Wattimena, Kompleksitas Agama di Abad 21: Pemahaman Transdisipliner dan Relevansinya untuk Indonesia 2019)

<sup>18</sup> Lihat (Wattimena, Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya 2016), terutama bagian tentang krisis akal budi.

<sup>19</sup> Lihat (Baumgart-Ochse 2017)

dapat sungguh diwujudkan melalui pandangan dunia yang murni sekular (tanpa agama dan tanpa iman).<sup>20</sup> Pandangan sekular murni justru mewujudkan isolasi, perpecahan dan krisis makna.

Pandangan bahwa agama merupakan sumber perang dan diskriminasi, sebenarnya, merupakan pandangan dari satu kelompok tertentu dan pada satu masa tertentu. Mereka adalah para pemikir ateis sekular yang hendak menggoyang kekuasaan agama di Eropa. Pandangan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan sosial, politik dan budaya Eropa. Agama tidak pernah sungguh hilang dari kehidupan bersama. Ia tetap menjadi pembentuk identitas, sekaligus cara berpikir dan cara hidup masyarakat Eropa secara keseluruhan.

Sekularisme memisahkan dengan tegas antara ruang privat dan ruang publik. Agama adalah urusan pribadi, dan masuk ke ruang privat. Sementara, politik dan hukum adalah urusan bersama, maka ia masuk ke ruang publik. Sampai titik tertentu, pembedaan ini amat penting, terutama untuk mengelola hidup bersama di dalam masyarakat yang majemuk.<sup>21</sup> Namun, pembedaan ini menjadi berbahaya, ketika ruang pribadi terserang virus radikalisme yang nantinya mengancam kehidupan bersama, seperti misalnya dalam hal terorisme yang berpijak pada ajaran agama.

Beberapa pemikir mengajukan ide, supaya suara-suara agama diangkat ke ruang politik sebagai bagian dari pembicaraan publik. Nilai-nilai dari agama kiranya bisa membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul di era globalisasi sekarang ini. Ini bisa dilakukan, asal agama menjadi terbuka dan komunikatif. Terbuka berarti agama tidak melihat ajarannya secara mutlak, dan mampu melihat dari sudut pandang yang lain. Komunikatif berarti agama mampu membahasakan pandangannya dengan bahasa yang bisa dimengerti anggota masyarakat lainnya. Kajian tentang agama di dalam masyarakat pasca-sekular kini menjadi bagian dari kajian transdisipliner yang melampaui batas-batas keilmuan.

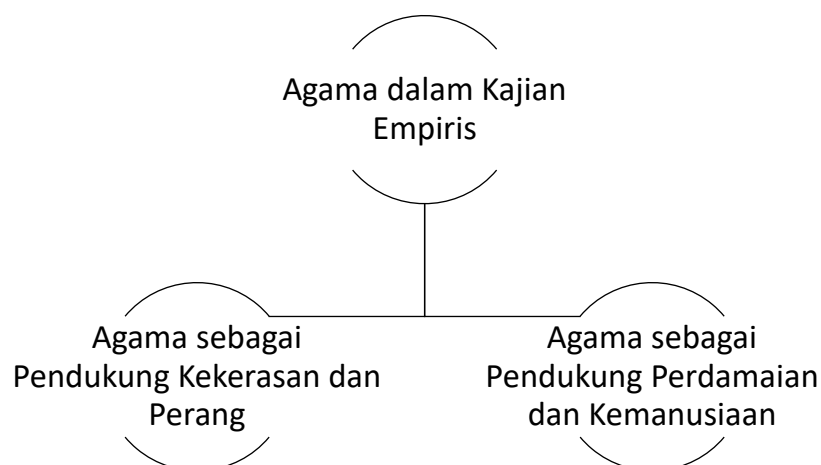
---

<sup>20</sup> Lihat (Reder 2014) dan (Baumgart-Ochse 2017)

<sup>21</sup> Lihat (Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik 2007) dan (Wattimena, Filsafat Politik untuk Indonesia 2010)

## 2. Agama: Malaikat Kematian atau Ratu Perdamaian?

**Bagan 2**  
**Agama dalam Kajian Ilmu Empiris<sup>22</sup>**



Pemaparan di atas berusaha memperlihatkan kaitan antara teori ilmu hubungan internasional dengan perkembangan agama di dalam politik global di abad 21 ini. Di satu sisi, pemahaman semacam itu amatlah perlu. Di sisi lain, agama juga perlu dipahami dalam satu tema tertentu, misalnya kaitan antara agama dan perdamaian, atau agama dan kekerasan. Perdamaian juga bisa dibagi menjadi dua, yakni peran agama di dalam politik pembangunan, sekaligus peran agama di dalam membangkitkan solidaritas global. Terkait dengan kekerasan, banyak penelitian juga telah dilakukan tentang hubungan antara agama dengan terorisme.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, penelitian tentang agama perlu berpijak pada data yang bersifat empiris. Beberapa pertanyaan penelitian yang kiranya penting. Mengapa orang-orang Katolik dan Kristen Protestan saling berperang di Irlandia Utara? Mengapa konflik antara Israel dan Palestina tidak kunjung usai? Apa peran agama di dalamnya? Mengapa orang-orang Buddha di Srilangka melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas? Di sisi

<sup>22</sup> Hasil rumusan penulis

<sup>23</sup> Lihat (B. A. Reza A.A Wattimena 2018) bersama Bustanul Arifin

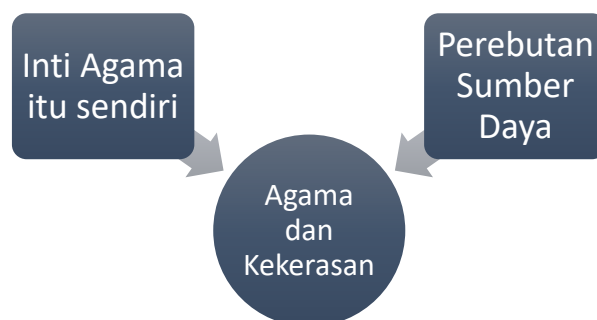
lain, mengapa banyak sekali organisasi dengan bendera agama melakukan kegiatan kemanusiaan di seluruh dunia?

Memang, agama terkesan ambivalen. Ia menjadi unsur penting dalam konflik. Tetapi, ia juga mendorong perdamaian dan kemanusiaan. Ambivalensi ini penting sebagai bahan dari penelitian. Namun, penelitian yang dilakukan sungguh harus berpijak pada data empiris yang terukur dalam satu konteks tertentu.

Pandangan lama menyatakan, bahwa agama merupakan sumber benturan peradaban yang melahirkan konflik dan perang. Namun, penelitian menunjukkan, bahwa halnya tak sesederhana itu. Disinilah pandangan tentang ambivalensi agama menjadi penting untuk diperhatikan. Di satu sisi, ketika konflik menggunakan agama sebagai pijakannya, maka konflik cenderung akan menjadi besar, dan berlangsung lama. Di sisi lain, ketika perdamaian menggunakan agama sebagai alatnya, maka kemungkinan terciptanya perdamaian juga akan meningkat.<sup>24</sup> Tidak hanya itu, agama juga memainkan peranan besar di dalam rekonsiliasi setelah konflik.<sup>25</sup>

Mari pertimbangkan argumen pertama. Di dalam konflik, campur tangan agama justru memperbesar dan memperpanjang konflik yang terjadi. Tentang ini, ada dua penjelasan. Pertama, agama dianggap memiliki inti yang bertentangan dengan perkembangan jaman, terutama modernitas dan globalisasi. Tidak hanya itu, setiap agama juga memiliki inti yang berbeda satu sama lain. Ini membuat konflik antar agama menjadi amat mudah terjadi, apalagi jika agama ditunggangi kepentingan politik.

### Bagan 3 Agama dan Kekerasan<sup>26</sup>



<sup>24</sup> Lihat (Baumgart-Ochse 2017)

<sup>25</sup> Lihat (Wattimena, Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung 2016)

<sup>26</sup> Hasil rumusan penulis

Pandangan kedua menegaskan, bahwa konflik agama hanya merupakan konflik permukaan. Akar konflik adalah persoalan ekonomi politik yang kemudian menggunakan agama untuk menggiring massa. Yang menonjol disini adalah peran para pemuka agama sekaligus elit politik dan ekonomi di dalam menciptakan, serta memperpanjang konflik. Dengan kata lain, masyarakat sudah memiliki perpecahan. Agama hanya digunakan untuk memperdalam perpecahan itu, sehingga menciptakan konflik dengan ukuran besar dan waktu yang lama. Dalam konflik semacam ini, ada sumber daya tertentu yang ingin diperebutkan, baik sumber daya alam, uang ataupun kedudukan politik.

Kemungkinan lain adalah konflik tersebut terjadi, karena perbedaan cara pandang dunia yang amat besar. Berbagai penelitian menunjukkan, bahwa perbedaan pandangan dunia, terutama yang terdapat di dalam agama, memiliki dampak yang sama besarnya dengan perebutan sumber daya di dalam menciptakan konflik. Konflik menjadi semakin besar dan panjang, jika perbedaan agama dibarengi dengan perebutan sumber daya di dalam masyarakat. Disinilah pentingnya penafsiran agama yang kompleks dan mendalam.<sup>27</sup> Sebagai paham, sekularisme lahir untuk menanggapi keadaan semacam ini.

Namun, agama juga memiliki sisi lain. Di banyak tempat, agama justru menjadi pencipta dan pelestari perdamaian. Ini tentunya tidak terjadi secara alami. Ada unsur penting yang perlu ada. Yang pertama adalah kemauan dan kemampuan untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama untuk kepentingan perdamaian. Yang kedua adalah kekuatan karakter para pemuka dan pemeluk agama yang ada, ketika konflik terjadi. Dalam hal ini, agama tentu harus bekerja sama dengan berbagai institusi yang ada, termasuk pemerintah dan penegak hukum.<sup>28</sup>

Teori politik klasik melihat, bahwa negara merupakan unsur politik yang utama. Keamanan negara adalah tujuan terpenting. Namun, sejak perang dingin berakhir, yakni di akhir abad 20, ada perubahan pandangan dasar tentang politik. Yang utama bukan lagi negara, melainkan warga negara. Karena bagaimanapun, negara adalah sebuah lembaga yang abstrak. Yang nyata adalah manusia-manusia yang tinggal dan bekerja di dalamnya.

---

<sup>27</sup> Lihat (Wattimena, Kompleksitas Agama di Abad 21: Pemahaman Transdisipliner dan Relevansinya untuk Indonesia 2019)

<sup>28</sup> Lihat (Baumgart-Ochse 2017)

Dalam arti ini, hak-hak asasi manusia dan politik pengembangan menjadi bagian penting dari politik internasional. Di dalam berbagai kajian, ini disebut sebagai perubahan paradigma dari negara sebagai pusat politik menjadi manusia sebagai pusat politik. Seluruh kajian ini disebut sebagai kajian humanitarisme. Cabangnya pun amat beragam, mulai dari bantuan kemanusiaan, kerja sama untuk pengembangan, perlindungan hak-hak asasi manusia, pencegahan konflik sampai dengan manajemen krisis. Dasarnya adalah tanggung jawab universal terhadap kesejahteraan semua manusia yang melampaui batas-batas agama, etnis, ras, gender maupun negara.<sup>29</sup>

Dasar dari gerakan ini adalah moralitas universal. Artinya, ada nilai kebenaran dan kebaikan yang berlaku lintas kebudayaan. Bentuk paling nyata dari ini adalah hak-hak asasi manusia yang diterjemahkan secara kontekstual di dalam hukum internasional, maupun hukum nasional. Agama juga terkait dengan pandangan ini. Nilai-nilai utama agama, seperti cinta, kerendahan hati, empati, martabat manusia dan arti penting kehidupan juga menjadi pendukung bagi beragam bentuk gerakan humanitarisme di tingkat internasional.

Sejak 1980an, berbagai kelompok agama terlibat aktif di dalam gerakan humanitarisme internasional. Isu yang kerap menjadi sasaran adalah persoalan kemiskinan dan ketimpangan global. Perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi membuat gerakan ini menjadi amat besar. Beberapa organisasi besar yang bergerak di bidang ini adalah *World Vision* dan *Caritas Internationalis*. Di organisasi-organisasi tersebut, tata kelola sudah dilaksanakan secara profesional dengan dukungan organisasi swasta maupun donatur pribadi. Namun, terkait dengan agama, ada kekhawatiran, bahwa gerakan humanitarisme yang berpijak pada agama menjadi alat penyebaran radikalisme agama.

Banyak juga organisasi agama yang bergerak di tingkat lokal. Mereka bergerak untuk mengurangi kemiskinan, dan membangun keadilan sosial di tingkat lokal. Ada juga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk di dalamnya pengadaan asuransi kesehatan, rumah sakit, air bersih dan gizi. Tentu saja, ini semua tak bisa dibaca secara naif. Organisasi-organisasi agama ini, walaupun bergerak di bidang humanitarian, tetap memiliki tujuan-tujuan politik yang perlu disingkapi secara bijak.

---

<sup>29</sup> Lihat (Hardiman 2016)

Tujuan politik memang tak selalu buruk. Sejatinya, politik adalah soal kebaikan bersama (*common good*). Banyak organisasi agama yang menekan pemerintah untuk memberikan pembebasan hutang kepada negara-negara miskin. Hutang dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip moral keadilan dan cinta kasih yang merupakan dasar dari banyak agama. Ini juga mempertimbangkan fakta, bahwa banyak negara kaya memperoleh harta mereka dari penjajahan terhadap negara-negara miskin. Hal ini sudah mulai didiskusikan sejak dekade 1970-an, dan banyak organisasi agama berperan penting di dalam proses ini.

Dialog antar agama juga amat penting disini. Memang, perdamaian dunia hanya mungkin, jika agama bisa saling berdialog, dan hidup dalam damai. Dialog pun juga perlu dilakukan dengan lembaga-lembaga lain yang bersifat sekular, seperti misalnya PBB ataupun Bank Dunia. Hanya dengan kerja sama berbagai pihak inilah perdamaian dunia yang berpijak pada keadilan dan kesejahteraan bisa terwujud. Namun, ada satu tantangan yang mesti diperhatikan.

Beberapa agama masih amat kuat memegang nilai-nilai tradisinya. Nilai ini kerap kali bertentangan dengan agama-agama lainnya, maupun dengan organisasi sekular. Yang paling mencolok adalah persoalan aborsi dan hak-hak kaum LGBTQ, yakni kamu lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer. Beberapa tegangan, dan bahkan konflik, kerap terjadi dalam konteks ini. Namun, ini tidak berarti, bahwa kerja sama global antara berbagai organisasi humanitarian harus dilepaskan.<sup>30</sup>

### 3. Kesimpulan

Di abad 21 ini, agama memainkan peranan yang semakin penting di dalam politik global. Kajian ilmiah terhadap peran agama di dalam politik global pun kini dilakukan dengan melintasi batas-batas keilmuan yang ada. Agama menyediakan nilai-nilai sekaligus komunitas untuk menciptakan perdamaian, sekaligus memadamkan konflik yang telah terjadi. Ini menjadi amat penting, terutama karena banyaknya gerakan teroris sekaligus konflik menjadikan agama sebagai latar belakangnya. Ini juga membuat perbedaan tajam antara agama sebagai urusan pribadi dan politik sebagai urusan bersama menjadi tipis. Perbedaan yang tetap diperlukan, namun tak setajam sebelumnya, seperti di dalam paham sekularisme ekstrem. Jadi, apakah agama

---

<sup>30</sup> Lihat (Baumgart-Ochse 2017)

merupakan malaikat kematian atau ratu perdamaian? Keduanya benar, dan ini amat tergantung dari keadaan nyata yang ada di dalam masyarakat.



**Daftar Acuan**

- Baumgart-Ochse, Claudia. 2017. "Religion und internationale Politik." Dalam *Handbuch Internationale Beziehungen*, oleh Carlo Masala (Eds) Frank Sauer, 1149-1172. Springer.
- Habermas, Jürgen. 1989. *Faktizität und Geltung - Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Hardiman, F. Budi. 2016. *Hak-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nye, Malory. 2008. *Religion: The Basics*. London: Routledge.
- Reder, Michael. 2014. *Religion in säkularer Gesellschaft: Über die neue Aufmerksamkeit für Religion in der politischen Philosophie*. Karl Alber.
- Reza A.A Wattimena, Anak Agung Banyu Perwita. 2018. *To Infinity and Beyond: Cosmopolitanism in International Relations*. Jakarta: Ary Suta Center.
- Reza A.A Wattimena, Bustanul Arifin. 2018. "Melampaui Terorisme: Pendekatan Komprehensif untuk Memahami dan Menangkal Terorisme." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta* 1 (1).
- Rheinhold Weber et.al. 2016. "Toleranz lernen: Zur Auseinandersetzung mit Toleranz and Intoleranz", *Politik und Unterricht: Zeitschrift für die Praxis der politischen Bildung*. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. .
- Wattimena, Reza A.A. July 2019. "Agama dan Kekuasaan: Tinjauan Transkeilmuan dan Kritik Ideologi." *Ary Suta Center Series on Strategic Management*.
- . 2016. *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 2008. *Filsafat dan Sains*. Jakarta: Grasindo.
- . 2010. *Filsafat Politik untuk Indonesia*. Pustakamas: Surabaya.
- Wattimena, Reza A.A. 2019. "Kompleksitas Agama di Abad 21: Pemahaman Transdisipliner dan Relevansinya untuk Indonesia." *ARY SUTA CENTER SERIES ON STRATEGIC MANAGEMENT*.
- . 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wattimena, Reza A.A. July 2018 Volume 42. "What are the Fundamental Pillars of Contemporary Globalization?" *THE ARY SUTA CENTER SERIES ON STRATEGIC MANAGEMENT*.
- . 2016. *Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung*. München.

